

Bappededa: Kota Bekasi Rawan Banjir Itu Alamiah

BEKASI – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi menyatakan, data di Kota Bekasi hanya memiliki kemiringan dua derajat dari bibir pantai utara (pantura). Hal itu membuat elevasi Kota Bekasi landai dan rawan terendam banjir.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Bekasi Erwin Gwinda mengatakan, kemiringan tanah itu terjadi apa adanya. Angka tersebut diperoleh dari hasil hitung peta Kota Bekasi dari udara.

"Ini terjadi secara alamiah sehingga kontur tanah relatif rata. Ini membuat drainase sulit mengalirkan air ke laut. Itu sebabnya mudah banjir," kata Erwin kepada *Republika*, Kamis (7/2).

Erwin menjelaskan, dampak yang paling mudah dilihat dari rendahnya kemiringan tanah di Kota Bekasi terkait kondisi aliran air di daerah aliran sungai (DAS). Akibat elevasi yang rendah, kata dia, air akan kerap meluap ketika mendapat kiriman air dari dataran yang lebih tinggi. Contohnya, Kali Bekasi yang sering mendapat kiriman dari bagian hulu di Kabupaten Bogor yang lokasinya lebih tinggi.

Oleh sebab itu, lanjut Erwin, Bappeda sebagai lembaga yang bertugas menyusun perencanaan sudah membuat program-program untuk mengantisipasi dampak dari kondisi tersebut. Salah satunya, melalui pengendalian banjir lewat pembangunan infrastruktur air, dengan terus membuat polder air yang menjadi area resapan ketika banjir terjadi.

"Pembangunan polder efektif untuk mengendalikan banjir. Hanya saja, yang masih menjadi masalah, ke mana air itu akan mengalir? Ini pekerjaan yang lain," tutur Erwin.

Terlepas dari pembangunan infrastruktur air, Erwin menjelaskan, Kota Bekasi masih membutuhkan ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak. Dari luas wilayah sekitar 210,5 kilometer persegi (km²), RTH baru mencapai 16 persen, terdiri 11 persen RTH pribadi dan lima persen RTH publik.

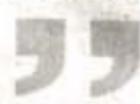
Padahal, apabila mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemkot Bekasi seharusnya menyediakan 30 persen RTH dari luas wilayah. Menurut Erwin, dengan menambah RTH maka dapat daerah resapan air lebih banyak, khususnya saat hujan mengguyur Kota Bekasi dengan intensitas yang tinggi.

Erwin mengatakan, kondisi elevasi tanah Kota Bekasi itu sudah disampaikan rutin kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) selaku lembaga teknis yang menangani. Karena itu, pihaknya berharap, DBMSDA dapat membuat arah pembangunan infrastruktur Kota Bekasi dengan tepat dan terencana.

Anggota DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menambahkan, pihaknya sejak lama sudah menduga ada perubahan kondisi permukaan tanah di Kota Bekasi. Menurut dia, hal itu dipicu oleh dua hal, yakni faktor alam dan dinamika pembangunan infrastruktur yang masif.

Oleh sebab itu, Ariyanto mengingatkan, kepada setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) terkait untuk tidak pernah lepas dari tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Bekasi dalam menjalankan program pembangunan. "Itu harus menjadi pedoman untuk seluruh pembangunan sebab membuat RTRW dan RDTR itu tidak sederhana," kata Ariyanto, kemarin.

Dia pun menegaskan agar Pemkot Bekasi segera membuat *master plan* drainase perkotaan. Pasalnya, dalam mengatasi banjir tidak hanya bisa diselesaikan dengan pembangunan polder air yang saat ini digencarkan.



Yang masih menjadi masalah, ke mana air itu akan mengalir?